
DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Pengantar Redaksi | iii |
| Topik | v |
| Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Budaya Batak Toba: Studi pada Masyarakat Muslim di Tapanuli Utara | 257 |
| Muhammad Abrar Parinduri | |
| Menjaga Sehat, Menjaga Adat: Praktik Pengobatan Tradisional <i>Tumpuroo</i> dan Pelestarian Adat Di Hukaea-Laeya | 271 |
| Early Wulandari Muis, Heksa Biopsi Puji Hastuti | |
| Problem Semantis dan Solusi Pemahaman Multiculturalism, Interculturalism, dan Cross-Cultural | 289 |
| Moh. Ali Aziz, Sokhi Huda | |
| Dinamika Sosial Masyarakat di Desa Kerta Buana: Perubahan Masyarakat dari Aktivitas Pertanian Menjadi Pertambangan | 305 |
| Robert Siburian | |
| Simbokronik Komunikasi (Bertahan dan Keterasingan Individu <i>Gay</i> di Jakarta) | 319 |
| Michael Jibrael Rorong | |
| Sejarah Migrasi dan Sistem Penghidupan Migran Etnis Bugis di Perantauan (Studi Kasus Migrasi Etnis Bugis di Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi) | 333 |
| Lesti Heriyanti, Ekawati Sri Wahyuni, Saharuddin, Aida Vitayala S Hubeis | |
| Disinformasi Keagamaan di Indonesia: Tinjauan Wacana | 353 |
| Ubaidillah, Arief Hartanto | |
| Polemik Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Pasca-Penerbitan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta) | 367 |
| Maulida Illiyani | |
| Tinjauan Buku Deforestasi dan Ketahanan Sosial | 381 |
| Bayu Andrianto Wirawan, Viktor Amrifo | |

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang Budiman.

Dalam edisi JMB kali ini, isu-isu mengenai masyarakat dan budaya kembali diangkat dalam sudut dan pendekatan persoalan-persoalan sosial, budaya, hukum, dan keagamaan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Masyarakat dan budaya adalah dua aspek yang tidak bisa dipisahkan. Budaya melekat pada individu-individu dalam suatu komunitas yang diwujudkan dalam bentuk nilai-nilai, sikap, kepercayaan, norma, hukum, dan sistem perilaku. Di dalam masyarakat, ada kebudayaan yang berkembang dan persoalan-persoalan sosial, serta hukum yang mewarnai kehidupan masyarakat. Kebudayaan menurut E.B Taylor¹ adalah pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Malinowski² dan Koentjaraningrat³ mengemukakan bahwa kebudayaan di dunia ini mempunyai tujuh unsur universal, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian.

Berangkat dari definisi kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan berbagai penulis, JMB edisi kali ini membahas isu-isu budaya dan religi, antara lain artikel “Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Budaya Batak Toba” yang membahas kearifan lokal yang terlihat dalam kehidupan masyarakat Batak Toba yang diimplementasikan melalui kekerabatan, religi, *hagabeon*, *hasangapon*, *hamoraon*, *hamajuaon*, *patik dohot uhum*, pengayoman, dan *marsisarian*. Kemudian, terdapat pembahasan mengenai sistem kepercayaan terhadap pengetahuan tradisional yang terejewantah dalam artikel “Menjaga Sehat, Menjaga Adat: Praktik Pengobatan Tradisional *Tumpuroo* dan Pelestarian Adat di Hukaea-Laeya.” Wilayah Hukaea-Laeya ditetapkan sebagai desa adat yang dihuni oleh etnis Moronene. Orang Moronene masih sangat percaya pada *tumpuroo* yang berperan sebagai pengobat tradisional. Artikel ini membahas mengenai konsep dan *worldview* tentang kesehatan yang dihubungkan dengan proses menjaga adat terkait roh leluhur dan sosok transendentalnya. Persoalan dinamika beragam kebudayaan di dalam masyarakat juga ditampilkan dalam artikel “Problem Semantis dan Solusi Pemahaman Multiculturalism, Interculturalism, dan Cross-Cultural.”

Unsur kebudayaan berupa mata pencaharian terlihat dalam artikel “Dinamika Sosial Masyarakat di Desa Kerta Buana: Perubahan Masyarakat dari Aktivitas Pertanian Menjadi Pertambangan”. Ada perubahan mata pencaharian masyarakat dari petani menjadi penambang yang menjadikan masyarakat beradaptasi dengan perubahan lingkungan tempat mereka tinggal. Di samping itu, persoalan nilai dan keajekan yang ada dalam masyarakat kadang membuat masyarakat tidak bisa menerima persoalan-persoalan yang bertentangan dengan keumuman atau norma yang sudah lama terbangun yang berakibat adanya alinerasi atau keterasingan. Hal ini terlihat dalam “Simbokronik Komunikasi (Bertahan dan Keterasingan Individu Gay di Jakarta.” Tidak mudah untuk menerima nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang bersumber dari kebudayaan dan religi, mungkin untuk menerima kehadiran gay di Indonesia perlu adanya transformasi budaya.

1 Taylor, E.B. 1871. *Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom*. London: J.Murray.

2 Malinowski, B. 1931. “Culture” in *Encyclopedia of Social Sciences*. London: MacMillan Publisher.

3 Koentjaraningrat. 1980. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.

Kebudayaan juga erat kaitannya dengan masyarakat dan adanya kegiatan mobilisasi dengan migrasi. Dalam edisi ini ada artikel yang membahas “Sejarah Migrasi dan Eksistensi Migran Etnis Bugis di Perantauan”. Artikel ini merupakan studi kasus migrasi etnis Bugis di Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Modal sosial dalam kehidupan etnis Bugis di perantauan memudahkan mereka mengembangkan sistem penghidupan untuk mendukung proses adaptasi dengan lingkungan baru di perantauan dan bahkan mampu mendorong sejumlah individu dalam memiliki aset dan menguasai perekonomian di perantauan.

Di dalam masyarakat banyak terdapat persoalan-persoalan sosial, hukum, keagamaan yang bisa menimbulkan potensi konflik di masyarakat. Persoalan sosial keagamaan dan konflik di masyarakat terlihat dalam isu mengenai disinformasi bertema komunisme, negara China dan etnis cina yang menunjukkan kelindan antara sentimen etnisitas dan agama, khususnya agama Islam. Masalah ini diangkat dalam artikel “Disinformasi Keagamaan di Indonesia”. Masalah disinformasi itu kemudian berjalanan dengan narasi-narasi historis dari masa-masa awal terbentuknya Indonesia sampai masa sekarang yang berpotensi berekskalasi menjadi kerusuhan atau konflik antarkelompok masyarakat. Di samping itu masalah pertanahan juga mengakibatkan polemik dan berpotensi menimbulkan konflik. Artikel “Polemik Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta” membahas pluralisme hukum pertanahan dan dualisme kepentingan. Artikel ini membahas mengenai muncul beberapa konflik tanah, misalnya penolakan atas klaim tanah desa sebagai bagian dari tanah Kasultanan, penggusuran pedagang dalam rangka penertiban *Sultan ground* dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang tidak boleh memiliki tanah di Yogyakarta. Sebagai penutup, edisi kali ini menampilkan tinjauan terhadap buku dengan judul “Deforestasi dan Ketahanan Sosial” yang mengangkat isu perubahan pola penggunaan lahan di Indonesia.

Pada akhirnya saya mengucapkan selamat membaca dan semoga edisi kali ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca yang tertarik untuk meneliti berbagai ragam persoalan-persoalan masyarakat dan budaya di Indonesia.

Laely Nur Hidayah.

TOPIK

PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PERSPEKTIF BUDAYA BATAK TOBA: STUDI PADA MASYARAKAT MUSLIM DI TAPANULI UTARA

Muhammad Abrar Parinduri

Universitas Medan Area
e-mail: abrarparinduri@staff.uma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membuktikan bahwa pertalian antara pendidikan akhlak dan kearifan lokal budaya Batak Toba dapat terlihat dalam kehidupan masyarakat yang diimplementasikan melalui kekerabatan, religi, *hagabeon*, *hasangapon*, *hamoraon*, *hamajuaon*, *patik dohot uhum*, pengayoman, dan *marsisarian*. Dari keseluruhan nilai tersebut, masing-masing saling berkaitan dengan muatan pendidikan akhlak, yang meliputi akhlak terhadap Allah Swt., akhlak terhadap Rasulullah saw., akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap masyarakat, dan akhlak terhadap negara. Asimilasi antara nilai budaya dan pendidikan akhlak tersebut ditransmisikan oleh orang tua melalui pendidikan keluarga, pertemuan keluarga, maupun acara-acara adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi lapangan dan etnografi. Adapun sumber data utama (primer) dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara, observasi terhadap media sosial, dan studi dokumen pendukung lainnya, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang relevan dengan pendidikan akhlak dan kearifan lokal budaya Batak Toba.

Kata kunci: Batak Toba, nilai budaya, pendidikan akhlak

MENJAGA SEHAT, MENJAGA ADAT: PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL *TUMPUROO* DAN PELESTARIAN ADAT DI HUKAEA-LAEYA

Early Wulandari Muis dan Heksa Biopsi Puji Hastuti

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara

Jalan Balai Kota II No. 65, Kendari, Indonesia

²Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara

Kompleks Bumi Praja, Jalan Haluoleo, Anduonohu, Poasia, Kendari, Indonesia

e-mail: earlywm_kdi04@gmail.com, heksa.biopsi@kemdikbud.go.id

ABSTRAK

Wilayah Hukaea-Laeya ditetapkan sebagai desa adat yang dihuni oleh etnis Moronene. Orang Moronene di sini masih sangat percaya kepada *tumpuroo* yang berperan sebagai pengobat tradisional. Dalam hal pengobatan, bahkan sampai saat ini, masyarakat Hukaea-Laeya masih menaruh kepercayaan besar pada *tumpuroo*. Keberadaan *tumpuroo* sangat lekat dengan penjagaan kesehatan dan kebudayaan adatnya. Tulisan ini bertujuan menjelaskan praktik pengobatan tradisional oleh *tumpuroo* dengan berbagai nilai dan cara pandangnya, serta pengaruhnya terhadap pelestarian tradisi, khususnya mantra. Penelitian dilakukan dengan metode etnografi di Hukaea-Laeya dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Dari analisis data dapat dijelaskan bahwa *tumpuroo* memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan masyarakat Moronene dari sakit dan penyakit. Di sisi lain, mereka juga menjadi aktor penting dari upaya pelestarian kearifan lokal yang tersimpan di dalam mantra-mantra pengobatan. Terlebih ketika konsep dan pandangan hidup tentang kesehatan juga dihubungkan dengan proses menjaga adat terkait roh leluhur dan sosok transendensinya. Peran sosial kesehatan para *tumpuroo* ini dapat ditingkatkan oleh pemerintah untuk mendorong pemajuan dan pembangunan kesehatan berbasis kapasitas masyarakat lokal.

Kata kunci: Hukaea-Laeya, *tumpuroo*, menjaga adat, pelestarian mantra, praktik pengobatan.

PROBLEM SEMANTIS DAN SOLUSI PEMAHAMAN MULTICULTURALISM, INTERCULTURALISM, DAN CROSS- CULTURAL

Moh. Ali Aziz

UIN Sunan Ampel Surabaya
e-mail: ali.aziz@uinsby.ac.id

Sokhi Huda

UIN Sunan Ampel Surabaya
e-mail: sokhi.huda@insby.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi problem semantis dan menemukan solusi pemahaman *multiculturalism*, *interculturalism*, dan *cross-cultural* dengan analisis hermeneutika Gadamer, filologis, dan historis kritis. Hasil kajian ini adalah problem semantis berawal dari *multiculturalism* yang memiliki banyak arti dan menuai perdebatan di kalangan akademisi. Problem ini mendapat respons berupa transposisi *multiculturalism* dengan kejelasan fiturnya. Diskusi muncul ketika problem *multiculturalism* berhadapan dengan tema *interculturalism* sebagai pendekatan pembanding. Ada dua perspektif argumen; argumen yang mendukung *multiculturalism* dan argumen responsif. Diskusi problem meningkat ketika "*interculturalism*" digunakan untuk menunjukkan model spesifik "*managing cultural diversity*" dalam multikulturalisme Kanada yang berbeda dengan *important respect* dari model interkulturalisme Eropa. Dua pendekatan tersebut memuat indikasi keuntungan strategis dalam pengalihan ke istilah "*interculturalism*" karena istilah "*multiculturalism*" dipandang telah ternoda secara politis selama dekade terakhir. Diskusi dapat menimbulkan puncak kritik terhadap arus studi multikulturalisme yang mengabaikan kontribusi disiplin primer, terutama antropologi dan psikologi sosial, khususnya teori kontak. Pada akhirnya, kajian ini mengajukan tiga poin solusi pemahaman; (1) *multiculturalism* merupakan konsep holistik dan basis ideologis pengakuan perbedaan budaya, (2) *interculturalism* merupakan model pengelolaan perbedaan budaya sesuai dengan basis budaya kawasan yang berbeda, (3) *cross-cultural* bersubstansi pola interaksi, program aksi, *skill*, dan instrumen manajemen konflik. Kajian ini berargumen bahwa problem semantis *multiculturalism*, *interculturalism*, dan *cross-cultural* memerlukan solusi pemahaman secara spesifik tentang karakteristik masing-masing istilah tersebut.

Kata Kunci: Problem semantis, *multiculturalism*, *interculturalism*, *cross-cultural*

DINAMIKA SOSIAL MASYARAKAT DI DESA KERTA BUANA: PERUBAHAN MASYARAKAT DARI AKTIVITAS PERTANIAN MENJADI PERTAMBANGAN

Robert Siburian

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
e-mail: robertsdes1970@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat di Desa Kerta Buana yang didatangkan pemerintah Indonesia pada tahun 1980 melalui program transmigrasi untuk menjadi petani pada saat itu. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan lahan seluas dua hektar untuk para peserta transmigrasi yang dibagi dalam tiga bidang. Luas lahan itu dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga transmigran. Dengan lahan dua hektar itu, sebelum tahun 2000, para transmigran di Desa Kerta Buana dapat menciptakan lumbung padi bagi Kecamatan Tenggarong Seberang melalui sawah-sawah yang mereka cetak. Akan tetapi, seiring ekspansi pertambangan batu bara dan perubahan mekanisme penambangan dari tambang dalam (*underground pit mining*) menjadi tambang terbuka (*open pit mining*), lambat laun istilah lumbung padi bergeser menjadi lumbung lubang tambang karena banyak lubang tambang yang terbuka dan tidak direklamasi. Kegiatan pertanian yang pernah mendominasi kini menjadi kegiatan yang seluruhnya tergantung pada dinamika kegiatan pertambangan yang ada di Desa Kerta Buana dan sekitarnya. Tulisan ini coba menjelaskan dinamika sosial yang sedang terjadi seiring kehadiran usaha pertambangan yang disponsori pemerintah melalui perizinan-perizinan yang diberikan pada perusahaan sehingga mampu mengubah daerah transmigrasi dengan kegiatan pertaniannya menjadi kawasan pertambangan bersama aktivitas perekonomian yang beraneka ragam.

Kata kunci: Desa Kerta Buana, dinamika sosial, masyarakat, transmigrasi, masyarakat pertanian, masyarakat pertambangan.

SIMBOKRONIK KOMUNIKASI (BERTAHAN DAN KETERASINGAN INDIVIDU GAY DI JAKARTA)

Michael Jibrael Rorong

Program Studi Ilmu Komunikasi.
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Putera Batam
e-mail: michaeljibrael@gmail.com/michael.rorong@puterabatam.ac.id

ABSTRACT

The existence of gay is a part of human life, however it is not necessarily recognized by the society. Gay is one of the sexual orientations used in individuals who claim to be open and present in social life. The life of gay individuals is synonymous with isolation, in this case the life struggle of a gay individual in society requires struggle. Behind that struggle, a deep meaning of life is tucked, and generates symbochronic communication. This research looks at and questions the lives that gay individuals live as part of society through their life experiences. This study uses a qualitative research approach, by describing every meaning of life of gay individuals, using theory, methodology, and phenomenological traditions. This study uses an interpretative paradigm basis because the aspect emphasized more in this study is the research subject, by not presenting the subject, by not presenting the subject. As part of research ethics, this study views the reality of gay individuals from Maurice Ponty's theoretical perspective, regarding the body. This research produces symbochronic communication created from the stereotypes of society. Key Word: Society, Gay, Symbochronic, Phenomenology, Qualitative.

SEJARAH MIGRASI DAN SISTEM PENGHIDUPAN MIGRAN ETNIS BUGIS DI PERANTAUAN

**(STUDI KASUS MIGRASI ETNIS BUGIS DI KELURAHAN KAMPUNG
LAUT DAN TANJUNG SOLOK, KECAMATAN KUALA JAMBI, KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI)**

Lesti Heriyanti¹, Ekawati Sri Wahyuni², Saharuddin³, Aida Vitayala S Hubeis⁴

¹Mahasiswa S3 Program Studi Sosiologi Pedesaan,
Fakultas Ekologi Manusia, Sekolah Pascasarjana IPB

²Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB

³Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB

⁴Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB

e-mail: lestiheriyanti@umb.ac.id

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis sejarah migrasi dan sistem etnis Bugis di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang didukung oleh panduan wawancara semi terstruktur, dilengkapi dengan observasi partisipan. Kuesioner juga digunakan untuk proses melengkapi data. Penelitian dilakukan terhadap 25 orang informan yang berasal dari etnis Bugis, Jawa, Sunda, Minangkabau, dan Melayu. Hasil penelitian menyatakan bahwa migrasi etnis Bugis ke wilayah Jambi merupakan sejarah panjang sejak Indonesia merdeka. Gejala politik dan keamanan pasca-Kemerdekaan Indonesia mendorong etnis Bugis untuk melakukan migrasi ke wilayah yang dinilai aman dan memiliki jaringan komunitas yang sama di wilayah tersebut. Keinginan untuk meraih tingkat ekonomi yang lebih baik juga mendorong migrasi ke luar wilayah tempat tinggal. Etnis Bugis di perantauan mengembangkan sistem pencaharian yang terkait dengan jalinan modal sosial intrakomunitas dan antarkomunitas yang ada. Kuatnya jejaring sosial dapat mendukung proses adaptasi dengan lingkungan baru di perantauan. Selain itu, juga mampu mendorong sejumlah individu untuk memiliki aset dalam jumlah yang besar dan menguasai perekonomian di perantauan.

Kata Kunci: migrasi, Bugis

DISINFORMASI KEAGAMAAN DI INDONESIA: TINJAUAN WACANA

Ubaidillah dan Arief Hartanto

Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya

e-mail: 23ubaid@gmail.com, riefhartanto@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berupaya untuk memaparkan disinformasi bertema komunisme negara China dan etnis China yang menunjukkan kelindan antara sentimen etnisitas dan agama, khususnya agama Islam yang berjalanan dengan narasi-narasi historis dari masa-masa awal terbentuknya Republik Indonesia. Jalinan narasi-narasi tersebut digunakan untuk mendeskripsikan proyeksi dampak disinformasi yang diinginkan oleh pelaku disinformasi. Data wacana disinformasi keagamaan diperoleh dari situs *cekfakta.com* dan *turnbackhoax.id* yang dikelola Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Situs tersebut melakukan konfirmasi apakah suatu informasi tergolong disinformasi atau bukan. Data dianalisis dengan menggunakan landasan teori analisis wacana kritis Fairclough (1989; 1992; 1995), tindak tutur Austin (1968), dan Searle (1969). Disinformasi keagamaan Islam di Indonesia mungkin memiliki daya persuasi tinggi karena memiliki landasan historis, dirawat oleh aktor otoritatif, dan ditopang oleh kondisi ketimpangan ekonomi antarkelompok masyarakat yang diasosiasikan secara aspek keagamaan dan etnisitas. Daya persuasi ini dapat memantik keadaan mental penerima disinformasi terdominasi oleh kemarahan, kebencian, atau hasrat membalas dendam dalam menginterpretasi sebuah wacana. Disinformasi ini pula dapat mengubah potensi sumber daya demografi menjadi sumber daya politik karena mampu menjangkau mayoritas penduduk Indonesia. Peristiwa Tanjung Balai memperlihatkan bahwa disinformasi ini pun sangat berpotensi menjadi kerusuhan atau konflik antarkelompok masyarakat.

Kata Kunci: Disinformasi Agama, Prinsip Direktif, Pendekatan Wacana

POLEMIK PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PASCA-PENERBITAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Maulida Illiyani

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

e-mail: maulidailliyani@gmail.com

ABSTRAK

Sejarah panjang, budaya yang kuat, dan jasa Kasultanan dalam proses kemerdekaan menjadi alasan utama mengapa Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah istimewa. Ada lima hal yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan, salah satunya adalah pertanahan. Hal yang kemudian menarik untuk dikaji adalah bagaimana sebenarnya pengaturan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tulisan ini dibuat menggunakan dua sumber, yaitu wawancara dan studi literatur. Secara normatif, pengaturan pertanahan di DIY diturunkan dalam Perdais No. 2 Tahun 2017, dengan ambisi besar Sultan untuk menertibkan dan melakukan inventarisasi ulang yang diklaim berdasarkan peta peninggalan Belanda. Sejumlah 13.226 tanah *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground* ditargetkan akan selesai diinventarisasi tahun 2024. Berbeda dengan daerah lainnya, terdapat tiga lembaga yang mengatur pertanahan di DIY: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota, Panitikismo, dan Badan Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaan kebijakan inventarisasi, muncul beberapa konflik tanah, misalnya penolakan atas klaim tanah desa sebagai bagian dari tanah Kasultanan, penggusuran pedagang dalam rangka penertiban *Sultan Ground* dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang tidak boleh memiliki tanah di Yogyakarta. Semangat untuk mengakomodasi eksistensi kebudayaan dan sejarah pengaturan pertanahan dalam prosesnya ternyata masih menimbulkan konflik dengan masyarakat bahkan pemerintah desa. Maka, tema tulisan ini menjadi penting untuk dibahas, sebab mengangkat sebuah diskursus yang masuk dalam ranah sakral sebuah otoritas yang mapan. Oleh karena itu, pluralisme hukum pertanahan adalah keniscayaan bagi DIY, di tengah dualisme kepentingan untuk mengakomodir karakteristik lokal dan nasional.

Kata Kunci: pengaturan pertanahan, Daerah Istimewa Yogyakarta, pluralisme hukum pertanahan.

TINJAUAN BUKU DEFORESTASI DAN KETAHANAN SOSIAL

Bayu Andrianto Wirawan dan Viktor Amrifo

Universitas Riau

bayu.andrianto7984@grad.unri.ac.id_victor.amrifo@lecturer.unri.ac.id



Judul : Deforestasi dan Ketahanan Sosial
Penulis : Herman Hidayat (Ed.)
Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Tahun Terbit : 2019
Jumlah Halaman : 326 halaman
ISBN : 978-602-433-751-3